

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan adanya perubahan masa dari orde baru ke era reformasi sangat memberikan dampak yang positif bagi perubahan paradigma pembangunan nasional. Adapun perubahan paradigma baru ini diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah, pemerintah daerah mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sekarang diubah menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas baik. Untuk dapat mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) pemerintah harus melakukan berbagai upaya-upaya yang dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup beberapa aspek baik dalam bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan sumber daya manusia. Pengukuran kinerja pemerintah adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan suatu kinerja yang berbasis akuntabilitas serta transparansi dan peningkatan

pelayanan terhadap masyarakat (Halim dan Laurensius 2005). Untuk mengelola pemerintahan dengan benar, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seharusnya memiliki kewenangan yang jelas dalam pengelolaannya.

Bentuk media pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah diatur dalam undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara. Pada Pasal 31. disebutkan bahwa gubernur /bupati/walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian serta pengambilan keputusan, harus sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan.

Informasi akuntansi yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya dapat bermanfaat baik dalam pengertian, aktivitas yang dapat bermanfaat dalam pengambilan sebuah keputusan dan dapat dipahami oleh para pengguna (Huang *et al*, 1999 dalam Xu *et al*, 2003). Agar bermanfaat, informasi akuntansi harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif laporan keuangan yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni (1) Relevan, (2) Andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi atau sesuai dengan kriteria

karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Masyarakat menuntut kepada pemerintah untuk menciptakan laporan keuangan sesuai dengan karakteristik kualitatif yang telah dijelaskan diatas. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk alat pertanggungjawaban manajemen suatu pemerintah terhadap publik.

Penerapan akuntansi yang baik serta pengawasan yang optimal dari pihak internal maupun eksternal terhadap kualitas laporan keuangan pada sebuah instansi pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberi opini jenis ini, artinya auditor berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, jika terdapat kesalahan, kesalahan tidak dianggap material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Opini BPK.](https://id.wikipedia.org/wiki/Opini_BPK)

Kompetensi sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan karakteristik kualitatif penyusunan, maka laporan yang dihasilkan oleh suatu lembaga pemerintahan dapat digunakan dalam hal pengambilan keputusan.

Menurut Nasruddin (2008), sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan dan kesuksesan sebuah instansi ataupun organisasi, disebabkan bahwa sumber daya manusia memiliki nilai peran yang sangat tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan dan keterampilan. Kualitas SDM memegang peranan penting dalam sebuah organisasi oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan SDM dibidang akuntansi pemerintahan.

SAP merupakan salah satu acuan dalam menyusun laporan keuangan. SAP merupakan landasan dasar yang penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap SAP, maka akan dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang disusun sesuai SAP akan menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan handal serta berguna dalam menentukan keputusan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan (PP No. 71 Tahun 2010).

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu kegiatan/proses yang dilakukan sesuai dengan tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh semua kalangan di instansi pemerintah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 tahun 2008).

Hal yang perlu diperhatikan yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan serta pemahaman standar akuntansi pemerintahan serta bagaimana sistem pengendalian internal dan sarana prasarana pendukung yang ada di sebuah instansi dapat beroperasi dan berguna untuk mencapai hasil yang efektif, efisien serta mencegah kerugian keuangan Negara demi kepentingan masyarakat dan kesejahteraan daerah.

Adapun hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, lima LKPD atau 83,33% dari total enam LKPD memperoleh opini WTP. Perolehan opini WTP atas LKPD tahun 2014 sama dengan tahun 2013.

Perkembangan Opini BPK Atas LKPD Tahun 2011-2014

dapat Dilihat Pada Tabel 1.1.

No	Pemerintah Kabupaten/Kota	Opini LKPD			
		2011	2012	2013	2014
1	Daerah Istimewa Yogyakarta	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kota Yogyakarta	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kabupaten Bantul	WDP	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Sleman	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Kulon Progo	WDP	WDP	WTP	WTP
6	Kabupaten Gunung Kidul	WDP	WDP	WDP	WDP

Sumber : Website BPK RI

Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul siap memperbaiki raih-an opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Kamis, 31 Maret 2016. “Kami sudah berusaha mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga semoga kami bisa memperbaiki capaian opini tahun lalu. ”Demikian harap Immawan Wahyudi di Kantor Perwakilan BPK Yogyakarta”. Parna juga pernah mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2015 tepat waktu sesuai amanah undang-undang. (www.yogyakarta.bpk.go.id/?p=8533).

Seiring berjalannya waktu, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melakukan berbagai upaya seperti membenahi Sistem Pengendalian Internal yang masih lemah, memperbaiki struktur maupun sistem penataan barang milik Negara/Daerah dengan tertib, serta memperbaiki ketentuan ketidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku, memberikan pelatihan terhadap pegawai/staff yang memiliki kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan, serta kurang

memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah. Semua kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul tersebut dijadikan sebagai sebuah poin penting oleh Pemerintah Daerah yang harus diperbaiki agar dapat memperoleh opini audit WTP dari BPK RI.

Berdasarkan informasi yang diperoleh diatas maka, peneliti melakukan penelitian mengenai aspek yang dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun judul penelitian yang akan diangkat yaitu "*Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Sarana Prasarana pendukung dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*".

B. BATASAN MASALAH

Batasan masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu mencakup SKPD yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, serta membahas hasil kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada seluruh dinas dan instansi pemerintahan di Gunung Kidul yang dapat dipengaruhi oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, serta peran Sarana Prasarana Pendukung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian yang berbeda dan waktu melakukan penelitian yaitu pada tahun 2016, serta

menambahkan satu variabel independen dari penelitian sebelumnya yaitu variabel peran sarana prasarana pendukung.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut;

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh entitas penyusun laporan keuangan dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah Peran Sarana dan Prasarana pendukung dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk menemukan bukti empiris kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh entitas penyusun laporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Untuk menemukan bukti empiris pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menemukan bukti empiris sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menemukan bukti empiris sarana dan prasarana pendukung berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis dan praktis adalah;

1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan literatur dalam perkembangan ilmu akuntansi berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, pemahaman standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan peran sarana prasarana pendukung. Serta memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya dalam bidang akuntansi sektor publik.

2) Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan atau himbauan bagi lembaga pemerintahan daerah dalam menerapkan standar-standar akuntansi pemerintahan, agar menghasilkan output laporan keuangan yang bermutu baik, agar dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Memberi sumbangan referensi bagi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan mengenai akuntabilitas laporan keuangan.

Bagi masyarakat sebagai *stakeholder* eksternal, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mendeteksi tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mendorong agar lebih berpartisipasi dalam mengawasi serta mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan baik.